

# PROFIL SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGI TIGA KOMUNITAS TRANSMIGRASI DI KAWASAN TOLIWANG HALMAHERA UTARA PASCA KONFLIK<sup>1)</sup>

Oleh: Septri Widiono <sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNIB

## Abstract

*The article describes community map by using socio-economic and ecological profile method in three communities at Toliwang, Halmahera Utara post-conflict. Based on the research, it was concluded that ecological capital have main potentially while social, money, physical and human capital need strengthening by assistance. The running of community empowerment has to be based on participatory and sustainability principal so that the conflict potential sources should be considered. They involve local power relation, ethnic and religion different, institutional aspect, and land tenure.*

**Keyword: community mapping**

## PENDAHULUAN

Transmigrasi di Toliwang-Halmahera Utara telah membuka kawasan ini untuk diproyeksikan sebagai penghasil utama padi bagi daerah Maluku Utara. Secara agronomis daerah Toliwang memang cocok dengan tipe pertanian sawah seperti di Jawa. Penempatan para transmigran sejak 1990-an diarahkan untuk mengubah rawa-rawa yang ditumbuhi semak dan perdu menjadi areal sawah sehingga lebih produktif. Demikian hendaknya melalui transmigrasi, percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dipadukan dalam kerangka modernisasi pertanian (Husodo, 2003).

Namun demikian upaya percepatan pembangunan KTI mengalami gangguan akibat konflik sosial pada tahun 1999 di Maluku. Konflik yang bermula dari Ambon ini eskalasinya mencapai lokasi transmigrasi di Toliwang. Tatanan sosial yang mulai terbentuk antara transmigran Jawa dengan suku-suku asli yang ditampakkan dengan adanya kerukunan sosial, diversifikasi ekonomi, dan pergeseran budaya materiil terkoyak oleh peristiwa konflik. Sebagian aktivitas terganggu seperti keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Kondisi ini tentunya memerlukan penanganan khusus untuk

---

<sup>1)</sup> *Tulisan ini merupakan versi lain dari hasil community mapping yang dilakukan sebagai langkah awal kegiatan pendampingan masyarakat pasca konflik oleh Tim Fakultas Pertanian IPB yang dibiayai oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2003. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ir. Hermanu Widjaja, MSc dan Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MAgr atas perkenannya memberi ijin penulisan ulang hasil kegiatan tersebut.*

mengembalikan dan mengorganisasikan masyarakat ke dalam tatanan yang kokoh. Kegiatan pemberdayaan masyarakat hendaknya mengacu pada justifikasi teoritis dan empiris. Justifikasi teoritis ditunjukkan dengan adanya orientasi ideologis yang menjelma dalam sejumlah prinsip-prinsip pemberdayaan. Sedangkan justifikasi empiris, hendaknya pemberdayaan benar-benar berangkat dari pokok permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu kegiatan pemetaan sosial mesti dilakukan sebelum pendampingan dijalankan. Tujuan studi ini adalah melakukan pemetaan komunitas (*community mapping*) melalui penyusunan profil sosial ekonomi dan ekologi komunitas sebagai acuan strategi pendampingan masyarakat pasca konflik.

### **METODE PENELITIAN**

Studi dilakukan pada bulan Oktober-November 2003 di lokasi yang sudah berakhir masa pemulangan pengungsi (2001-2002) korban konflik, yaitu UPT SP V, eks UPT SP II A dan SP II B Kecamatan Kao, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik bola salju meliputi pembesar marga, tokoh formal dan informal, serta ketua kelompok tani. Data-data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam, FGD, pengamatan berperanserta, dan membaca peta.

Studi ini berada pada paradigma kualitatif dengan pilihan strategi studi kasus. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah fenomenologi. Untuk itu analisis data dilakukan dengan teknik keterlibatan langsung dan interpretasi makna yang terkandung dalam fakta sosial subjektif subjek penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Disintegrasi Sosial Akibat Konflik Horizontal**

Konflik sosial bemuansa SARA yang terjadi di Kao pada akhir tahun 1999 telah menimbulkan kekacauan (*chaos*) pada tatanan sosial yang mulai bergerak menuju kemapanan. Suasana kacau menunjukkan kondisi disintegrasi sosial. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. Kerusakan Sarana Fisik**

Konflik yang melibatkan suku-suku di Kao (Kristiani) dan suku Makkian (Muslim) mengakibatkan kerusakan sejumlah sarana fisik penyokong sistem kehidupan masyarakat. Kerusakan terutama menimpa fasilitas umum seperti rumah ibadah, pasar, pertokoan, dan jaringan

PLN. Sampai saat penelitian berlangsung, secara berangsur-angsur pemerintah dan beberapa LSM internasional tengah melakukan *recovery* atas sejumlah kerusakan ini.

## **2. Meningkatnya Prasangka (*Prejudice*)**

Sebelum terjadinya konflik, beberapa *stereotype* memang sudah melekat pada masing-masing suku/agama tertentu. *Stereotype* yang melekat pada suku asli Kao (termasuk Mudole) adalah kasar perangainya, jorok, dan lambat bekerja. Dengan budaya seperti ini suku Makkian menganggap Kecamatan Kao sulit berkembang. Suku-suku asli Kao (Kristiani) memandang pendatang muslim Makkian dan Muslim Jawa ingin menyebarkan agamanya dan terlalu berambisi menguasai perekonomian. Muslim Makkian lebih fundamentalis daripada Muslim Jawa.

Meletusnya konflik meningkatkan kedalaman *stereotype* ini hingga menjadi prasangka negatif (*prejudice*) satu sama lain. Kecamatan Kao yang kaya dengan sumberdaya alam ternyata masih lambat perkembangannya. Tambang emas yang dikuasai oleh PT NHM tidak memakmurkan penduduk sekitar. Lokasi tambang yang berada di wilayah Malifut ini dianggap akan menjadi potensi utama bagi Malifut sehingga tuntutan memisahkan diri dari Kecamatan Kao semakin menguat. Dengan memisahkan diri, Malifut kelak akan lebih cepat berkembang karena suku-suku asli sulit diajak maju.

Sebagai pendatang, kelompok Makkian dianggap terlalu berlebihan. Daerah-daerah di sekitar Malifut akan di-Islam-kan. Tokoh-tokoh adat (*sangaji adat*) dan para pendeta melalui berbagai pertemuan di gereja memobilisasi warganya untuk waspada dan siap siaga sebagaimana nenek moyangnya ketika akan menghadapi serangan musuh. Stigma negatif yang berasal dari nenek moyang dan ajaran agama Nasrani terhadap muslim semakin sering dilontarkan dan menambah keyakinan para warganya.

## **3. Meningkatnya Ketegangan Sosial**

Kondisi ketegangan sosial dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut. Setiap dini hari warga suku Mudole dipimpin oleh sesepuh marga bergerak dari soa-nya menuju lokasi sekitar perbatasan Kao-Malifut. Mereka berjalan kaki berbaris bersaf ke belakang, tak ubahnya suku pedalaman akan menghadapi serangan musuh. Senjata khas Maluku, salawaku, tombak dan panah dibawa oleh setiap orang yang secara bergiliran dijadwal untuk menjaga pemukiman suku-suku asli Kao dan menyerang jika sewaktu-waktu terjadi keributan. Masyarakat transmigran Jawa diwajibkan

oleh sangaji adat untuk menyiapkan perbekalan logistik. Jadi, sebelum para lelaki pergi 'berperang', transmigran Jawa ini sudah sibuk tengah malamnya membuat bermacam-macam makanan pengenyang perut. Bagi yang tidak bersedia akan ditakut-takuti bahkan dianggap memihak muslim Makkian sehingga boleh dibunuh. Dalam suasana terancam seperti ini warga Jawa menuruti kehendak suku Mudole. Keadaan seperti ini berlangsung hingga mereka mengungsi (kembali) ke daerah asalnya di Jawa.

Keadaan semakin tegang karena terjadi pencurian oleh sekelompok orang tak dikenal terhadap barang-barang milik warga Jawa. Masuknya aparat militer dari Manado dan Jawa Timur bukan membuat suasana menjadi tenang. Justru sebaliknya, perintah mengungsi dari aparat militer membuat warga menjadi takut. Perintah mengungsi kepada warga Jawa yang mendadak ini dimanfaatkan oleh oknum militer dengan memperlakuk agen-agen sipil untuk membeli sapi dan motor milik pengungsi dengan harga yang sangat rendah. Sapi bali seharga 2 juta dibeli antara 50-75 ribu rupiah saja. Karena terpaksa, akhirnya para pemilik sapi ini menjual juga, berapa pun harganya. Bahkan sebelum diangkut dengan truk tentara, para pengungsi ini diwajibkan membayar biaya penyeberangan sebesar 25-50 ribu rupiah. Di antara para pengungsi ini banyak yang tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga seperti alat-alat elektronik yang ada di rumahnya.

#### **4. Kerusakan Lahan Pertanian**

Dalam suasana yang tidak stabil itu para warga lebih memilih mengerjakan sesuatu yang tidak jauh dari sekitar rumahnya. Pertimbangan keamanan menyebabkan mereka tidak berani pergi jauh baik ke kebun maupun ke desa lain. Memisahkan diri dari kelompoknya juga sesuatu yang riskan untuk dilakukan. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut warga masyarakat kurang memperhatikan kondisi pertaniannya. Para petani tidak berani menggarap sawah dan kebunnya. Lahan persawahan dan perkebunan ditumbuhi semak belukar. Sebagian areal persawahan kembali menjadi rawa-rawa tidak produktif. Beberapa areal lahan kering yang sudah dipersiapkan untuk tanaman palawija dan sayur-sayuran terbengkalai kembali ditumbuhi alang-alang.

## 5. Stagnasi Kegiatan Ekonomi

Sebagai akibat terganggunya kegiatan pertanian, ekonomi Toliwang yang digerakkan oleh sektor pertanian ini mengalami kemadegan (stagnasi). Terganggunya aktivitas pertanian otomatis menurunkan tingkat pendapatan petani yang selanjutnya mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat secara keseluruhan. Tidak itu saja distribusi barang-barang yang didatangkan dari luar juga mengalami gangguan. Nyaris kegiatan perekonomian lumpuh. Karena tidak tersedia beras di pasar mengakibatkan masyarakat suku Mudole kembali mengolah sagu sebagai makanan pokoknya setelah sekian lama beralih ke beras.

### Profil Sosial Ekonomi dan Ekologi Komunitas

#### 1. Struktur Modal Penyokong Kehidupan

Menurut Dharmawan (2001), setiap masyarakat memiliki strategi kehidupan (*livelihood strategies*). Secara prinsip, masyarakat mempunyai sejumlah sumberdaya yang bila dimanfaatkan secara konstruktif akan menjadi modal yang berguna. Terdapat lima modal yang akan dipergunakan untuk menganalisis kondisi lokasi penelitian.

##### A. Modal Fisik (*Physical Capital*)

Ketersediaan infrastruktur perumahan belum banyak mengalami perubahan model dan bentuk standar transmigrasi (ukuran 6X8 M, atap seng, dinding papan dan lantai tanah). Sedikit rumah telah dimodifikasi bentuk dan ukurannya. Ada yang sudah berlantai semen dan berdinding batubata. Umumnya perumahan menyebar di gang-gang, hanya di UPT SP V perumahan mengumpul di pertengahan desa yang dulunya menjadi pusat pertokoan.

Saat ini sedang dibangun saluran primer dan sekunder irigasi (belum berfungsi). Dengan demikian untuk bersawah para petani mengandalkan air hujan. Pada waktu pemulangan pemerintah memberi bantuan mesin perontok padi dan *handtractor*; untuk UPT SP V: 2, 1; eks UPT SP II A: 2, 2; dan eks UPT SP II B: 2, 2. Jumlah ini masih belum sebanding dengan kebutuhan bertani. Akibatnya mesin dan alat ini dikuasai oleh segelintir orang saja. Ketersediaan *heuler* sangat terbatas yaitu 1 di eks UPT SP II A dan 1 di eks UPT SP II B. Keterbatasan infrastruktur ekonomi lainnya adalah sarana pengangkutan hasil pertanian, kondisi jalan dan jembatan gang (rusak tertutup semak belukar setelah ditinggal dua tahun mengungsi), dan pasar hasil-hasil pertanian (pasar Kao 1 jam perjalanan motor).

Sarana penerangan yang digunakan penduduk pada umumnya berupa lampu minyak. Beberapa penduduk memiliki mesin generator listrik namun tidak mencukupi kebutuhan penerangan semua rumah yang ada. Khusus eks UPT SP II A, masyarakat secara kolektif menggunakan generator listrik untuk memenuhi kebutuhan penerangan. Media informasi radio dan televisi sangat terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Untuk menangkap gelombang televisi harus menggunakan antena parabola.

Air sumur yang dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air rumah tangga, kualitasnya mulai dari buruk hingga baik. Kualitas buruk dinilai masyarakat dengan ciri warna air keruh/kuning dan berasa air rawa. Sedangkan kualitas baik, bening, tidak mengandung minyak, dan tidak berasa. Tidak semua rumah tersedia air sumur yang baik sehingga air sumur yang berkualitas baik menjadi milik bersama.

Sarana pendidikan SD ada di setiap UPT dan SMP ada di eks UPT SP II B. Aktivitas belajar mengajar belum normal terlihat dari seringnya jam pelajaran yang kosong. Pendidikan informal khususnya masalah moral-agama berlangsung di gereja dan mushala/masjid.

#### **B. Modal Ekologi (*Ecological Capital*)**

Berdasarkan peta zona agroekologi (2002), lokasi penelitian berada pada zona agroekologi IV ax dengan bentuk permukaan lahan relatif datar dan lereng < 8%. Elevasi berada pada ketinggian < 700 M dpl. Dengan kondisi ini lahan pertanian tidak memerlukan konservasi tanah yang ketat.

Curah hujan tahunan rata-rata 2.308 mm dan suhu rata-rata harian 26°C dengan kelembaban 75-90 %. Musim hujan jatuh pada bulan Januari-Juni dan musim kemarau bulan September-Desember. Pemisah komunitas eks UPT SP II A dan SP II B ialah sungai besar Tolabit yang potensial banjir pada waktu musim hujan. Kejadian banjir tahun 2000 telah merusak sebagian besar persawahan petani UPT SP V. Disamping itu beberapa sungai kecil menjari juga mengalir melewati lahan-lahan pertanian dan pemukiman penduduk.

Kondisi tanah berpasir, berwarna kecoklatan tidak terlalu liat dan sesuai dengan peta zona agroekologi tipe tanah tergolong ke dalam tanah kesuburan sedang yaitu Dystrudepts, Eutrodepts, dan Hapludalf. Jenis vegetasi yang dominan adalah tumbuhan jenis perdu dan kayu sedang. Kedalaman air tanah tergolong dangkal (kurang lebih 1 M).

Kondisi ekologis seperti ini mempengaruhi sistem pertanian yang dikembangkan oleh petani. Berdasarkan pengamatan lapang, sistem pertanian terdiri dari sawah dengan irigasi non-teknis, pertanian lahan kering dengan tanaman pangan semusim dan hortikultura serta sistem pertanian tanaman tahunan kelapa dan sagu. Disamping itu masih terdapat satu potensi kehutanan yang belum produktif yaitu durian, dan langsung.

### **C. Modal Sosial (*Social Capital*)**

Modal sosial yang diamati di sini dibatasi pada aspek jaringan sosial. Jaringan sosial yang eksis berbentuk gotong royong, kekeluargaan, dan komersial. Ikatan gotong royong dan kekeluargaan tampak pada kegiatan bemuansa sosial (bersih desa, syukuran, pesta, dan upacara kematian) maupun bernilai ekonomi (hubungan pertanian). Sedangkan ikatan komersial terlihat pada hubungan perdagangan (jual-beli).

Dalam produksi pertanian terdapat sistem *kerja barengan* dalam mempersiapkan lahan, menanam, dan sistem *bawon* (1:7) pada waktu panen padi bagi petani Jawa. Bagi petani kelapa suku Mudole, ikatan kekeluargaan tampak pada perekrutan buruh yang lebih mengutamakan sanak famili (marga). Pola jaringan sosial semacam ini lebih memperlihatkan mekanisme membagi resiko sekaligus sebagai investasi sosial-ekonomis. Penyelenggara pekerjaan berkewajiban memberi makan, minum dan rokok para pekerja. Dari sisi beban kerja terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Jadi resiko kekurangan tenaga kerja dan alat-alat dapat diminimalkan. Pola bekerja bergantian secara sukarela pada dasarnya merupakan hubungan timbal balik yang setara dari sekadar hubungan imbalan materi. Terlebih lagi kesetaraan hubungan timbal balik dapat memupuk solidaritas dalam kelompok kerjanya. Sehingga jaringan sosial ini tidak dapat dikatakan komersial walaupun dikenal *upahan*. Upah yang diberikan tidak bersifat kontraktual sebagaimana di dalam pabrik. Upah lebih didasari sebagai pengganti lelah yang suatu saat akan dikeluarkan juga ketika ia menjadi penyelenggara kegiatan.

Terbentuknya jaringan sosial didasarkan atas kesamaan etnis dan kesamaan nasib. Atas dasar ini di SP V terdapat tiga (3) jaringan sosial besar yaitu jaringan sosial antar-suku Mudole, antar-suku Jawa transmigran asli, dan antar-suku Jawa pengungsi titipan. Sedangkan di eks UPT SP II A hanya ada dua (2) jaringan sosial yang terbentuk atas dasar subetnis (Jawa Tengah dan Jawa Timur). Satu perkecualian di eks UPT SP II B, karena keberadaan petani-petani kuat mempengaruhi

pola interaksi sosial, jaringan sosial lebih berorientasi pada hubungan kekuasaan. Dalam kasus ini kesamaan sub-etnis menjadi kurang penting. Sebaliknya kemampuan petani kuat membangun interelasi dengan petani-petani kecil pada berbagai pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lebih menentukan. Akibatnya dalam proses ini terdapat indikasi terbentuknya pola hubungan *patron-client* di eks UPT SP II B yang berinterseksi dalam hal sub-etnis maupun agama. Jadi modal sosial di UPT SP V dan eks UPT SP II A cenderung berkonsolidasi (internal) sedangkan di eks UPT SP II B berinterseksi (eksternal).

Meskipun demikian masing-masing jaringan sosial yang terbentuk memiliki derajat kedalaman yang tinggi. Hal ini tampak pada keterlibatan hubungan sosio-emosional serta pengorbanan fisik dan uang pada setiap relasi yang dibangun. Makna kebersamaan bagi masyarakat sangat mendalam setelah terjadi “uji coba” kekuasaan melalui konflik 1999.

Keluasan jaringan di antara warga suku Jawa lebih dominan intra-desa. Hanya sedikit orang yang memiliki jaringan ke luar desa –khususnya dalam hubungan agraris. Sedangkan bagi suku Mudole, jaringan antar-desa sama kuatnya dengan intra-desa. Semua warga suku Mudole berada dalam satuan marga yang diikat oleh kesatuan adat lintas desa<sup>3)</sup>. Norma-norma pokok yang membentuk jaringan tersebut dilandasi oleh norma adat Mudole-Nasrani dan Jawa-Islam.

#### **D. Modal Finansial (*Money Capital*)**

Modal keuangan yang tersedia sangat terbatas. Untuk membiayai kegiatan pertanian produktif, petani menggunakan modal uang yang diperoleh dari hasil panen sebelumnya, usaha sampingan, menjadi buruh tani, atau meminjam kepada tetangga. Sumber lain yang dilakukan oleh petani (usia muda) ialah masuk ke sektor informal di Kota Tobelo dan Temate dengan menjadi pedagang kaki lima, penarik becak, dan tokang ojeg. Khusus di eks UPT SP II A dan SP II B masyarakat tengah menunggu bantuan pemerintah dalam Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Bantuan Pinjaman Langsung kepada Masyarakat (BPLM), dan Proyek Peningkatan Mutu Intensif Petani Padi (PMI Padi).

---

<sup>3)</sup> Pada mulanya suku Mudole tersebar ke dalam 12 perkampungan (soa) yang berada di barat daya wilayah Kao. Antar-kampung dipisahkan oleh hutan dan sungai kecil maupun besar. Suku ini masih memegang teguh prinsip-prinsip adat yang dijalankan oleh seorang Sangaji Adat (Ketua Adat). Masing-masing soa dipimpin oleh kepala soa (kini menjadi kepala desa definitif) yang umumnya pembesar marga. Beberapa marga suku Mudole adalah seto, me, payahe, aky, tuluino, gumemen, cepa, tamaka, singian, akelow, sesoru, takalamingan, dauwole, gato, mebuca, baesa, garawai dan mangamis.



### **E. Modal Manusia (*Human Capital*)**

Petani memiliki keterampilan, kemampuan, dan kapasitas memadai dalam bertani. Namun karena tidak tersedia PPL pertanian dan perkebunan membuat kapasitas SDM petani tidak berkembang. Seperti dalam mengatasi hama penyakit padi merah yang sedang ganas pada saat penelitian dilakukan, petani hanya bisa mengeluh dan pasrah terhadap kondisi tersebut. Akhirnya praktik bertani dijalankan atas pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bertani di Jawa dan kebiasaan berkebun bagi petani suku Mudole. Adaptasi petani Mudole kepada lahan kering lebih dipengaruhi oleh proses belajar bersama dengan petani Jawa. Petani Mudole belum bisa bertani sawah.

### **2. Sistem Stratifikasi Sosial dan Hubungan Kekuasaan**

Sistem stratifikasi sosial lebih identik dengan pola yang dikemukakan oleh Weber yaitu sistem status (Giddens, 1986). Status sosial ditentukan berdasarkan kehormatan yang melekat pada diri seseorang. Lapisan atas terdiri dari orang yang paling dihormati yaitu: ketua adat, kepala desa, kepala dusun, tokoh agama (pendeta dan imam), dan pemuka masyarakat. Golongan ini memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif dan basis massa pada jaringan sosialnya. Lapisan menengah ditempati oleh petani yang ekonominya berkecukupan, menguasai alsintan bantuan pemerintah dan membuka toko. Sedangkan lapisan bawah diduduki oleh petani lainnya yang tidak disebut tokoh (formal dan informal) dan juga bukan orang berkecukupan.

Sistem pelapisan tidak ketat dan tidak ada gejala polarisasi sehingga pola hubungan lintas lapisan tidak berpotensi menjadi konflik. Sebaliknya potensi konflik tampak nyata pada hubungan horizontal yang melibatkan hubungan kekuasaan dan jaringan sosial. Potensi konflik di SP V: masalah status pengungsi titipan; di eks SP II A: adanya *ingroup feeling* 'Jawa Timur' dan 'Jawa Tengah'; dan di eks SP II B: kelompok patron 'penguasa'.

### **3. Dimensi Hubungan Antar-Kelompok**

Analisis hubungan antar-kelompok menurut Kinloch (Sunarto, 2000) berlaku dimensi sejarah, sikap, dan institusi. Dalam dimensi sejarah, pola hubungan mengarah pada dominasi budaya etnis Mudole terhadap etnis Jawa dan segregasi hubungan agraris. Sebagai penduduk pribumi, suku Mudole yang ditopang oleh struktur adat dan gereja lebih mewarnai kehidupan sosial ekonomi dan politik lokal. Gejala ini menguat terutama pada saat konflik berlangsung dan masih tampak pada

kondisi sosial sekarang. Sedangkan pola hubungan agraris hingga saat ini cenderung membentuk dua pola hubungan yaitu pola yang biasa tampak pada pertanian ekologi sawah (Jawa) dan ekologi perkebunan (Mudole). Gejala ini terjadi karena pola pembinaan transmigrasi lebih memprioritaskan petani sawah daripada petani kebun.

Dalam dimensi sikap, dapat dilihat masih membekasnya tragedi konflik yang berwujud *stereotype* dan *prejudice*. Walaupun pengembalian para pengungsi Jawa ke lokasi transmigrasi disambut baik oleh para pemuka adat, sejumlah label negatif dan prasangka masih dilekatkan antara orang Jawa dan orang Asli. Hanya saja intensitasnya lebih rendah bila dibandingkan pada saat konflik. Hal ini kemudian membatasi interaksi pada hal-hal yang bersifat permukaan –tidak menyentuh aspek internal sikap. Tampaknya sikap ini terbentuk karena perbedaan budaya idiil yang diametral antara Islam-Jawa dengan Kristen-Mudole.

Mengacu pada kuadran kelembagaan Kolopaking dan Tony (1994) identifikasi dimensi institusi yang turut membentuk pola hubungan antar-kelompok meliputi kelembagaan yang tercakup dalam empat ranah. 1) Ranah *Non-Government – Modern*; PT NHM yang melakukan penambangan kurang memberi manfaat bagi komunitas lingkaran perusahaan sehingga berpeluang menjadi sumber konflik baru secara vertikal. Saat ini banyak penduduk terutama suku asli turut melakukan penggalian. Beragam pendapat dari kelompok-kelompok lain (Jawa), ada yang membenarkan dan tidak. Namun seiring dengan tidak jelasnya status PT NHM, kegiatan penambangan masyarakat semakin bertambah. Masyarakat bahu-membahu untuk ambil bagian dalam kegiatan penggalian.

2) Ranah *Government – Modern*; Pertama, Dinas Pertanian melakukan pembentukan kelompok tani (*top-down*) berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Proyek bantuan bagi petani di eks SP II A dan SP II B, petani menyerahkan sepenuhnya kepada ketua kelompok tani untuk menyusun program. Kedua, rencana Pemda Halmahera Utara memekarkan kawasan Toliwang menjadi Kecamatan Kao Barat pasca pemilu 2004. Proyek ini cukup mampu memobilisasi kelompok suku Asli dan Jawa dalam dinamika politik lokal. Suku asli memanfaatkan jaringan gereja dan *sangaji adat*. Sedangkan kelompok Jawa menggunakan jalur formal (forum Kepala Desa).

3) Ranah *Government – Traditional*; Institusi Kepala Desa dan BPD sangat mempengaruhi dinamika kelompok intra-desa. Kenyataan ini tidak dapat dilepaskan dari fenomena di SP V: rencana peralihan status menjadi desa definitif dan di eks SP II A dan SP II B: pemilihan Kepala Desa dan

pembentukan BPD. Sementara Kelompok Tani yang dibentuk oleh Dinas Pertanian tidak menampakkan dinamikanya.

4) Ranah *Non-Government – Traditional*; Semua bentuk *indigenous institution* berperan aktif dalam membentuk pola hubungan antar-kelompok yaitu *sangaji adat* dan gereja. Dua institusi inilah yang mendominasi corak interaksi dalam komunitas. Sebagian kaum Muslim membentuk institusi bawaan yaitu *yasinan* berada dalam kondisi pasif.

#### 4. Sistem Penguasaan Tanah

Pada mulanya tanah lokasi transmigrasi adalah milik suku Mudole yang berwujud hutan. Tanah-tanah ini telah diserahkan penguasaannya kepada para pembesar marga -kemudian disebut tuan tanah oleh masyarakat setempat. Dengan pembagian merata, anggota marga menguasai tanah tidak kurang dari 5 ha per orang. Kemudian pemerintah melakukan negosiasi untuk penempatan transmigran pada tahun 1990-1991. Pemuka suku Mudole merestui sebagian hutannya menjadi UPT dengan catatan pemukiman transmigrasi mampu membawa perubahan baik bagi kehidupan suku asli dengan menyertakan beberapa KK menjadi transmigran lokal. Proses pengalihan penguasaan ini berlangsung dengan cara ganti rugi.

Dengan demikian terdapat dua sistem penguasaan tanah yaitu tanah adat yang telah diserahkan kepada pembesar marga dan tanah pemberian negara kepada transmigran Jawa. Jenis pertama berlaku pola pemilikan semi-komunal berdasarkan marga. Tanah semi-komunal menunjukkan adanya batas yang kurang jelas dalam pemilikan dan pemanfaatan bersama (*common property*). Meskipun kebun diproduksi dan hasilnya dinikmati bersama-sama anggota marga tetapi status tanah sudah jelas pemilik dan dari siapa tanah itu diperoleh. Sedangkan jenis kedua beralih menjadi pemilikan pribadi (*private property*) baik yang sudah disertifikasi (eks SP II A dan SP II B) maupun yang belum (SP V). Luas tanah jenis ini adalah 2 ha/KK yang terdiri dari 0,25 ha pekarangan, 0,75 ha lahan I, dan 1 ha lahan II. Tanah-tanah ini dipersiapkan sebagai hamparan persawahan yang menyatu dengan perkebunan milik suku asli. Terjadi akumulasi penguasaan tanah berupa penyerahan sertifikat tanah yang pemiliknya enggan kembali ke lokasi. Sampai akhir pemulangan 2002, ada beberapa orang yang memegang hingga 5-7 sertifikat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi komunitas pasca konflik belum terorganisasi dan berada dalam kondisi ketidakberdayaan. Namun demikian sejumlah potensi yang berakar pada budaya dan sejarah pembentukan komunitas transmigrasi layak dijadikan pijakan dalam menyusun agenda pembenahan. Potensi utama yang dapat dijadikan sebagai modal adalah modal ekologis. Empat modal lainnya yaitu modal sosial, finansial, fisik, dan manusia perlu penguatan melalui pendampingan. Hendaknya formulasi lima modal ini selalu berada dalam konteks sejarah pembentukan komunitas dan potensi konflik yang dapat bersumber dari hubungan kekuasaan lokal, perbedaan etnis dan agama, aspek institusional dan penguasaan tanah. Kegiatan pendampingan mesti dijalankan secara partisipatif (*participatory*) dan berkelanjutan (*sustainability*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, A.H. 2001. *Farm Household Livelihood Strategies and Socio-economic Changes in Rural Indonesia: A Comparative Study*. PhD Dissertation of The Institute of Rural Development, University of Goettingen, Germany.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Jakarta: UI Press.
- Husodo, Siswono Y. 2003. *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. (cet. Ketiga). Jakarta: Depnakertrans RI.
- Kolopaking, LM dan Tonny, F. 1994. *Aspek Kelembagaan dan Partisipasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara Terpadu*. Mimbar Sosek No. 8, Desember. Bogor: Jurusan Sosek IPB.
- Puslitanak. 2002. *Peta Zona Agroekologi dan Alternatif Komoditas Pertanian 1:250.000*.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.